

Implementations of the E-Buddy Application in Improving Administrative Services at Kenongo Village

Implementasi Aplikasi E-Buddy dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi Desa Kenongo

Suryaning Tyas¹⁾, Hendra Sukmana²⁾ (10pt)

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: Hendrasukmana@umsida.ac.id (wajib email institusi)

Abstract. *This document describes guidelines for Authors in writing an article in UMSIDA. This abstract section should be typed in Italic 10 pt font and number of words of 100-150. If the article is written in Indonesian, the abstract should be typed in English and Indonesian. Meanwhile, if the article is written in English, the abstract should be typed in English only. The abstract should be typed as concisely as possible and should be composed of: problem statement, method, scientific finding results, a short conclusion, and impact. The abstract should be typed in one paragraph only and two-columns format. All sections in the manuscript should be typed using Times New Roman font. Authors should use this document as their article template.*

Keywords - author guidelines; UMSIDA Preprints Server; article template

Abstrak. *Dokumen ini menjabarkan petunjuk bagi Penulis dalam menyusun artikel di UMSIDA Preprints Server. Bagian abstrak ini harus ditulis dengan huruf miring 10pt dan dengan jumlah kata 100-150. Jika artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, abstrak harus ditulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Jika artikel ditulis dalam bahasa Inggris, abstrak harus ditulis hanya dalam bahasa Inggris. Abstrak harus ditulis singkat mungkin dan harus tersusun atas rumusan masalah, metodologi, hasil penemuan/pengembangan, simpulan ringkas, dan dampak. Abstrak harus ditulis dalam satu paragraf dengan format 1 kolom. Semua bagian dalam artikel harus ditulis menggunakan huruf Times New Roman. Penulis sebaiknya menggunakan dokumen ini sebagai template artikelnya.*

Kata Kunci - petunjuk penulis; UMSIDA Preprints Server; template artikel

I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi komputer memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung berbagai aktivitas kerja, baik di instansi pemerintah maupun di sektor swasta. Dalam lingkungan perkantoran modern, pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan proses kerja dilakukan secara lebih efisien, kolaboratif, dan tanpa batasan ruang maupun waktu. Hal ini menjadikan teknologi sebagai elemen penting dalam memperlancar kegiatan administrasi dan mendukung produktivitas organisasi. Dalam konteks pengelolaan tata usaha, baik pada lembaga pemerintah maupun swasta, kelancaran administrasi menjadi faktor utama untuk menunjang efektivitas kerja dan pencapaian tujuan organisasi. Salah satu aspek penting dalam kegiatan administrasi adalah pengelolaan surat atau dokumen resmi. Surat tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi formal, tetapi juga sebagai sumber data dan arsip yang mengandung informasi penting bagi keberlangsungan dan kemajuan suatu organisasi.[1]

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah secara fundamental cara kerja organisasi, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, memperluas aksesibilitas, serta membentuk budaya kerja yang lebih modern dan dinamis. Dalam konteks globalisasi, TIK menjadi faktor utama yang mendorong perubahan di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, hingga hukum. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah terus melakukan penataan sistem tata kelola pemerintahan melalui berbagai program digitalisasi yang tertuang dalam *roadmap* pengembangan e-government. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan efektivitas proses bisnis pemerintahan dan mempercepat pelaksanaan birokrasi dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana pendukung administrasi yang efisien dan transparan.[2]

Reformasi birokrasi yang sedang dijalankan juga mencakup penerapan sistem berbasis teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan ini tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga mencakup pembenahan struktur organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur, serta penguatan manajemen pemerintahan. Penataan birokrasi menjadi langkah penting dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintahan, karena keberhasilan reformasi birokrasi sangat berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan negara secara keseluruhan.[3]

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang lebih baik, cepat, dan transparan mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan konsep Electronic Government (E-Government). Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam administrasi pemerintahan adalah pengelolaan surat-menyurat yang masih dilakukan secara manual, sehingga proses akses, pencatatan, dan distribusi menjadi lambat. Kondisi tersebut menuntut adanya inovasi dalam sistem administrasi berbasis digital. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan inovasi Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) yang berfungsi mengelola surat dan arsip pemerintahan secara digital.[4]

Adapun dasar hukum sesuai dengan penerapan program Aplikasi E-BUDDY mencakup beberapa peraturan penting. Yang pertama, Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah. Inovasi ini menjadi bagian penting dari upaya optimalisasi tata persuratan dan efisiensi kinerja administrasi pemerintahan. Penerapan e-government sendiri merupakan bentuk pelaksanaan administrasi pemerintahan berbasis teknologi digital yang berorientasi pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik. Pemerintah Indonesia mengadopsi konsep ini dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi dan kebutuhan akan sistem informasi yang terintegrasi. Salah satu landasan penting pengembangan e-government adalah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengembangan E-Government, yang menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi harus diarahkan untuk memperkuat manajemen pemerintahan dan meningkatkan kualitas layanan publik.[5]

Selanjutnya, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menjadi wujud konkret transformasi digital pemerintahan Indonesia. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, responsif, dan adaptif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat mengintegrasikan proses administrasi dan pelayanan publik ke dalam satu sistem elektronik yang efisien.

Menurut Adriwati (2001), e-government merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi digital seperti internet untuk melaksanakan pelayanan publik, melakukan komunikasi dan koordinasi antarinstansi, serta mendukung transaksi dan pengelolaan data pemerintahan. Sistem ini mencakup berbagai hubungan, baik antara pemerintah dengan dunia usaha (G2B), antarinstansi pemerintah (G2G), maupun antara pemerintah dengan masyarakat (G2C). Dalam konteks yang lebih luas, konsep Smart City juga muncul sebagai bentuk penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan daerah, kualitas hidup warga, serta keberlanjutan lingkungan. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan konsep Sidoarjo Smart City sejak tahun 2017 melalui berbagai program berbasis teknologi publik. Upaya tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel.[6]

Salah satu inovasi yang lahir dari kebijakan tersebut adalah Aplikasi E-Buddy, sebuah sistem perkantoran digital yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan administrasi dan meningkatkan efektivitas kerja aparatur. Aplikasi ini dinilai praktis dan memberikan nilai tambah dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Keunikan Aplikasi E-Buddy terletak pada kemampuannya menciptakan budaya kerja yang lebih efisien, fleksibel, dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Selain itu, penerapan aplikasi ini juga memperkuat rasa tanggung jawab dan komitmen aparatur terhadap kinerja pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan profesional.[7]

Secara operasional, E-Buddy berfungsi sebagai sistem perkantoran digital yang mengintegrasikan berbagai aktivitas administrasi dalam satu platform berbasis elektronik. Melalui aplikasi ini, seluruh proses surat-menyurat baik surat masuk maupun surat keluar dikelola secara digital tanpa harus menggunakan dokumen fisik. Setiap surat yang diterima akan masuk ke sistem inbox dan langsung dapat diteruskan ke pejabat atau bagian terkait melalui fitur disposisi online. Proses pembuatan surat keluar pun dilakukan melalui template yang tersedia di aplikasi, sehingga meminimalisasi kesalahan dan mempercepat alur administrasi. Selain fitur surat-menyurat, E-Buddy juga menyediakan sistem pengarsipan digital yang memungkinkan setiap dokumen tersimpan secara otomatis dalam basis data. Aparatur dapat mencari dokumen lama hanya dengan menggunakan kata kunci tertentu, tanpa harus membuka berkas secara manual. Hal ini memudahkan proses audit, pelaporan, dan koordinasi antarbagian.

Selain meningkatkan efektivitas kerja, penggunaan E-Buddy juga mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Setiap aktivitas administrasi dapat dipantau secara real time oleh pimpinan, sehingga mengurangi risiko keterlambatan dan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, Aplikasi E-Buddy tidak hanya mempermudah pengelolaan administrasi, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1.
Jumlah Dokumen yang berhasil diterbitkan melalui E-Buddy

Tahun	Jumlah Dokumen Terbit melalui E-Buddy
2023	1.234 dokumen
2024	1.856 dokumen
2025	2.104 dokumen

Sumber : Diolah dari pemerintah Desa Kenongo (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 1, jumlah dokumen yang berhasil diterbitkan melalui aplikasi E-Buddy menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023, jumlah dokumen yang diterbitkan tercatat sebanyak 1.234 dokumen, yang mencerminkan tahap awal pemanfaatan aplikasi E-Buddy dalam mendukung pelayanan administrasi desa. Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 1.856 dokumen, yang menunjukkan meningkatnya pemanfaatan layanan digital oleh masyarakat serta mulai optimalnya penggunaan aplikasi dalam proses administrasi desa. Pada tahun 2025, jumlah dokumen yang diterbitkan kembali meningkat menjadi 2.104 dokumen, seiring dengan meningkatnya target layanan dan semakin stabilnya implementasi sistem E-Buddy.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas implementasi aplikasi E-Buddy dalam mendukung transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian yang dilakukan oleh Nadila dan Choiriyah (2023) berjudul *Implementation of E-Government Through E-Buddy in Sidoarjo Regency* menjelaskan bahwa penerapan aplikasi E-Buddy sebagai sistem surat dinas elektronik telah membantu meningkatkan efektivitas kerja aparatur desa. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kendala dalam aspek sumber daya manusia, terutama terkait kemampuan dan kesiapan pegawai dalam mengoperasikan sistem digital secara optimal.

Selanjutnya, Mulyoto dan Utami (2024) dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Aplikasi E-Buddy pada Pengelolaan Arsip Surat Masuk (Studi pada DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo)* menguraikan bahwa aplikasi E-Buddy telah mempermudah proses pengarsipan dan distribusi surat di lingkungan instansi pemerintah. Meskipun demikian, ditemukan beberapa hambatan teknis seperti sistem yang kadang mengalami gangguan (error) dan keterbatasan tenaga operator yang kompeten dalam pengelolaan arsip digital. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh faktor manusia yang menjalankannya.

Sementara itu, penelitian oleh Hanifah dan Rodiyah (2024) dengan judul *E-Buddy's Impact on Local Governance in Indonesia through Transforming Document Management* menyoroti dampak positif aplikasi E-Buddy terhadap tata kelola pemerintahan lokal. Studi ini menemukan bahwa penggunaan sistem dokumen elektronik mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Namun, peneliti juga menegaskan pentingnya dukungan infrastruktur teknologi dan pelatihan sumber daya manusia agar implementasi aplikasi dapat berjalan secara berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa aplikasi E-Buddy memiliki peran strategis dalam mendorong digitalisasi administrasi pemerintahan, khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Meskipun membawa banyak manfaat, keberhasilan implementasinya tetap bergantung pada kesiapan teknologi, kompetensi SDM, serta komitmen lembaga dalam menjalankan transformasi digital secara konsisten.

Berdasarkan hasil observasi terhadap implementasi Aplikasi E-Buddy dalam peningkatan pelayanan administrasi di Desa Kenongo, ditemukan dua permasalahan utama yang memengaruhi implementasi kebijakan penggunaan aplikasi tersebut. Permasalahan pertama berkaitan dengan indikator organization (organisasi), yaitu belum optimalnya pengorganisasian sumber daya dalam pelaksanaan Aplikasi E-Buddy. Meskipun telah ditetapkan aparatur yang bertanggung jawab dalam pengoperasian aplikasi, masih terdapat pembagian tugas dan koordinasi yang belum berjalan secara maksimal. Selain itu, kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan sistem digital masih beragam sehingga memengaruhi kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi berbasis elektronik. Kondisi tersebut menyebabkan proses administrasi belum sepenuhnya berjalan secara efektif sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Permasalahan kedua berkaitan dengan indikator application (penerapan), yaitu belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi melalui Aplikasi E-Buddy. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala teknis, seperti gangguan jaringan internet, sistem aplikasi yang terkadang mengalami error, serta keterbatasan perangkat pendukung yang digunakan aparatur desa. Selain itu, belum seluruh proses administrasi dapat dilakukan secara konsisten melalui aplikasi sehingga pada kondisi tertentu pelayanan masih dilakukan secara manual. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelayanan administrasi menjadi kurang efisien dan tujuan implementasi Aplikasi E-Buddy untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, dan berbasis digital belum sepenuhnya tercapai.

Penelitian berjudul “Implementasi Aplikasi E-Buddy dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi Desa Kenongo” menggunakan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones (1996) sebagai landasan analisis. Teori ini dipilih karena menekankan proses implementasi kebijakan sebagai suatu rangkaian aktivitas yang melibatkan aspek

kelembagaan, pemahaman kebijakan, serta tindakan nyata di lapangan. Menurut Charles O. Jones, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga indikator utama, yaitu 1) organisasi, 2) interpretasi, dan 3) aplikasi.

Dalam konteks penerapan Aplikasi E-Buddy, indikator organisasi berkaitan dengan kesiapan struktur kelembagaan pemerintah desa, pembagian tugas aparatur, serta koordinasi antarunit kerja yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi berbasis digital. Organisasi yang tertata dengan baik akan mendukung kelancaran pelaksanaan program serta meminimalkan hambatan administratif dalam penggunaan aplikasi E-Buddy.

Indikator interpretasi merujuk pada kemampuan aparatur desa dalam memahami kebijakan dan tujuan penerapan Aplikasi E-Buddy. Pemahaman yang baik terhadap petunjuk teknis, fungsi aplikasi, serta manfaat digitalisasi pelayanan administrasi menjadi faktor penting agar kebijakan dapat diterjemahkan secara tepat ke dalam praktik kerja sehari-hari. Interpretasi yang berbeda atau kurang tepat berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan.

Selanjutnya, indikator aplikasi berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan secara nyata melalui penggunaan Aplikasi E-Buddy dalam pelayanan administrasi desa. Pada tahap ini, implementasi dilihat dari sejauh mana aplikasi digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien oleh aparatur desa dalam melayani masyarakat, serta dampaknya terhadap peningkatan kecepatan, ketepatan, dan transparansi pelayanan. Melalui pendekatan teori Charles O. Jones (1996) ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai proses implementasi Aplikasi E-Buddy di Desa Kenongo, termasuk faktor pendukung dan penghambat, serta kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan administrasi desa.

II. METODE

Penelitian ini berlokasi di Pemerintah Desa Kenongo. Lokasi penelitian dipilih karena Desa Kenongo merupakan salah satu desa yang telah menerapkan Aplikasi E-Buddy sebagai inovasi dalam pelayanan administrasi desa, sehingga relevan untuk dijadikan objek kajian terkait implementasi pelayanan publik berbasis digital. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:347), metode penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang bertujuan untuk memahami makna perilaku individu maupun kelompok serta menggambarkan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Proses penelitian kualitatif dilakukan melalui penyusunan pertanyaan penelitian dan prosedur penelitian yang bersifat fleksibel, serta pengumpulan dan penggabungan data yang diperoleh dari partisipan di lapangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan, observasi terhadap proses pelayanan administrasi desa, serta dokumentasi yang berkaitan dengan penggunaan Aplikasi E-Buddy. Sementara itu, data sekunder diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui studi literatur, seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan terkait, serta media massa yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Desa Kenongo, sekretaris desa, dan staf pelayanan sebagai pengoperasi layanan administrasi melalui Aplikasi E-Buddy.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman (1994:12) yang meliputi empat tahapan. Pertama, pengumpulan data, yaitu proses memperoleh data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kedua, reduksi data, yakni proses seleksi, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta transformasi data mentah yang diperoleh di lapangan untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Ketiga, penyajian data, yaitu penyusunan data dalam bentuk narasi atau tabel secara sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis secara menyeluruh. Keempat, penarikan kesimpulan, yaitu proses merangkum dan menginterpretasikan seluruh data yang diperoleh di lapangan guna menjawab tujuan penelitian terkait implementasi Aplikasi E-Buddy dalam peningkatan pelayanan administrasi Desa Kenongo.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Results

Implementasi Aplikasi E-Buddy dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi Desa Kenongo dianalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones (1996). Teori ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan atau program pelayanan administrasi berbasis digital dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat desa. Menurut Charles O. Jones, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga indikator utama, yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

Organisasi

Organisasi dapat diartikan sebagai suatu kerangka hubungan yang tersusun secara terstruktur, di mana di dalamnya telah diatur secara jelas mengenai tanggung jawab, kewenangan, serta pembagian tugas guna menjalankan fungsi tertentu. Menurut Charles O. Jones (1996), dimensi organisasi dalam implementasi kebijakan menekankan pada bagaimana struktur organisasi, pembagian peran, penetapan prosedur kerja, serta koordinasi antarunit pelaksana diatur untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Organisasi berfungsi sebagai wadah yang memastikan kebijakan dapat dijalankan secara sistematis dan terkoordinasi.

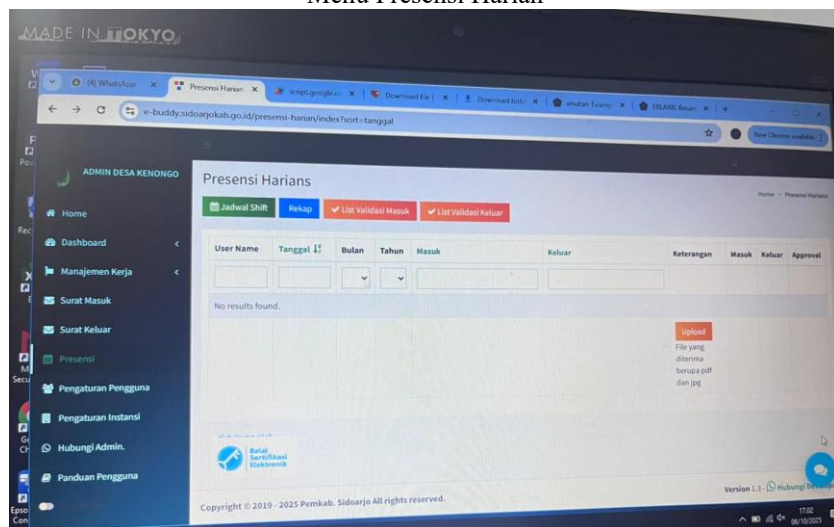
"Kalau menurut saya yang bertanggung jawab selama ini yang ada aplikasi itu sudah sesuai. dan mungkin itu sudah bisa maksimal. Tapi ya itu tadi, terkadang kan namanya sistem. Ada surat yang masuk, ada yang tidak. Jadi akhirnya kita miskomunikasi dengan Pak Lurah, biasanya begitu. Ya kan nggak bisa menyalahkan, namanya juga sistem. Terkadang itu ada undangan yang di desa lain masuk, tapi di desa Kenongo nggak masuk." Wawancara 10 Desember 2025

"Mungkin bisa jadi. Namanya juga mirip di Kecamatan Tulangan ini kan ada 22 desa. Terkadang kan dari kabupaten aja sudah berapa Kecamatan. Tapi ya itu hanya beberapa persen saja sih. Ya memang kendalanya di situ, tapi hanya mungkin 5-6 persen saja terjadi masalah". Ucapan Mbak Irma selaku pengoperasional aplikasi E-buddy di desa Kenongo.

Berdasarkan kedua pernyataan Mbak Irma selaku pengoperasional Aplikasi E-Buddy di Desa Kenongo, dapat disimpulkan bahwa dari indikator organisasi, pelaksanaan dan pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugas masing-masing. Struktur organisasi serta peran aparatur desa dalam mengoperasikan Aplikasi E-Buddy dinilai sudah maksimal dan mampu mendukung pelayanan administrasi desa. Namun demikian, masih terdapat kendala teknis yang berdampak pada alur komunikasi organisasi, khususnya terkait tidak masuknya sebagian surat atau undangan ke sistem desa, yang berpotensi menimbulkan miskomunikasi antara aparatur desa dan kepala desa. Kendala tersebut bersifat insidental dan terjadi dalam persentase kecil, sehingga secara umum tidak mengganggu kinerja organisasi, tetapi tetap menunjukkan perlunya penguatan koordinasi dan sistem pendukung agar alur informasi antarunit organisasi dapat berjalan lebih optimal.

Gambar 2.

Menu Presensi Harian



Sumber : Diolah Desa Kenongo 2025

Menurut Gambar 1 dapat diketahui tampilan menu Presensi Harian pada Aplikasi E-Buddy yang digunakan oleh Admin Desa Kenongo. Tampilan ini menunjukkan sistem presensi aparatur desa yang terintegrasi secara digital sebagai bagian dari peningkatan pelayanan administrasi desa. Proses presensi diawali dengan masuknya admin ke dalam sistem E-Buddy, kemudian memilih menu *Presensi Harian*. Pada halaman ini tersedia beberapa fitur utama, yaitu Jadwal Shift, Rekap, List Validasi Masuk, dan List Validasi Keluar, yang berfungsi untuk mengelola dan memantau kehadiran aparatur desa secara sistematis.

Dalam menu presensi harian, admin dapat melakukan pencarian data presensi berdasarkan nama pengguna, tanggal, bulan, dan tahun, sehingga memudahkan proses pengawasan dan penelusuran data kehadiran. Selain itu, sistem juga menyediakan kolom informasi terkait waktu masuk, waktu keluar, keterangan, serta status persetujuan (approval). Apabila terdapat data presensi yang memerlukan verifikasi, admin dapat melakukan proses validasi masuk dan validasi keluar, termasuk dengan mengunggah dokumen pendukung dalam format PDF atau JPG sebagai bukti kehadiran.

Tabel 2

Jadwal Jam Kerja Aparatur Desa Kenongo

No	Shift Kerja	Hari Kerja	Jam Masuk	Jam Keluar	Keterangan
1	Shift Pagi	Senin – Jumat	07.30 WIB	12.00 WIB	Jam kerja pagi aparatur desa
2	Shift Siang	Senin – Jumat	12.30 WIB	16.00 WIB	Jam kerja lanjutan pelayanan
3	Shift Full Day	Senin – Jumat	07.30 WIB	16.00 WIB	Berlaku bagi aparatur dengan tugas pelayanan penuh
4	Shift Khusus	Sesuai kebutuhan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Digunakan untuk kegiatan desa tertentu (rapat, pelayanan tambahan, dinas luar)

Sumber : Diolah Desa Kenongo 2025

Berdasarkan tabel Jadwal Shift Jam Kerja Aparatur Desa Kenongo, dapat dijelaskan bahwa pengaturan jam kerja aparatur desa telah disusun secara sistematis untuk mendukung kelancaran pelayanan administrasi kepada masyarakat. Pembagian shift kerja ini bertujuan untuk memastikan kehadiran aparatur desa tetap terjaga sepanjang jam pelayanan yang telah ditetapkan.

Shift pagi berlaku pada hari Senin sampai Jumat dengan jam kerja mulai pukul 07.30 WIB hingga 12.00 WIB. Shift ini umumnya diikuti oleh aparatur desa yang bertugas pada pelayanan administrasi dasar dan kegiatan operasional rutin. Selanjutnya, shift siang dilaksanakan pada hari yang sama dengan jam kerja mulai pukul 12.30 WIB hingga 16.00 WIB, yang berfungsi sebagai kelanjutan pelayanan agar aktivitas administrasi desa tetap berjalan hingga akhir jam kerja. Lalu terdapat shift full day yang berlangsung dari pukul 07.30 WIB hingga 16.00 WIB dan diperuntukkan bagi aparatur desa yang memiliki tanggung jawab pelayanan penuh atau tugas tertentu yang membutuhkan kehadiran sepanjang hari kerja. Sementara itu, shift khusus diterapkan secara fleksibel sesuai kebutuhan desa, seperti pada kegiatan rapat, pelayanan tambahan, atau dinas luar, dengan jam masuk dan keluar yang disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan desa.

Pengaturan jadwal shift ini diintegrasikan ke dalam Aplikasi E-Buddy melalui fitur Jadwal Shift, sehingga admin dapat mengelola, memantau, dan menyesuaikan jam kerja aparatur desa secara digital. Dengan adanya sistem ini, proses presensi menjadi lebih tertib, transparan, serta memudahkan pengawasan kehadiran aparatur desa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di Desa Kenongo.

Berdasarkan fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator organisasi belum sepenuhnya sesuai sebagai suatu kerangka hubungan yang tersusun secara terstruktur, di mana di dalamnya telah diatur secara jelas mengenai tanggung jawab, kewenangan, serta pembagian tugas guna menjalankan fungsi tertentu. Menurut Charles O. Jones (1996), dimensi organisasi dalam implementasi kebijakan menekankan pada bagaimana struktur organisasi, pembagian peran, penetapan prosedur kerja, serta koordinasi antarunit pelaksana diatur untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4), yang menyatakan bahwa kepala desa berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa serta mengoordinasikan perangkat desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pengaturan mengenai pembagian tugas dan tata kerja perangkat desa juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yang mengatur struktur organisasi, fungsi, serta hubungan kerja antarperangkat desa. Dengan adanya landasan hukum tersebut, penerapan Aplikasi E-Buddy dalam pengelolaan presensi aparatur desa mencerminkan dimensi organisasi yang jelas, terstruktur, dan terkoordinasi, sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan pelayanan administrasi di Desa Kenongo.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Nadila dan Choiriyah (2023) yang menyatakan bahwa implementasi E-Buddy mampu meningkatkan efektivitas kerja aparatur desa melalui digitalisasi administrasi pemerintahan. Persamaannya terletak pada pemanfaatan teknologi digital yang mendukung pelaksanaan tugas aparatur desa secara lebih terstruktur dan efisien. Namun, penelitian Nadila dan Choiriyah lebih menyoroti kendala pada aspek sumber daya manusia, khususnya kemampuan dan kesiapan pegawai dalam mengoperasikan sistem digital. Sementara itu, pada penelitian ini, aparatur Desa Kenongo pada umumnya telah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing, sehingga permasalahan yang ditemukan lebih banyak berkaitan dengan gangguan sistem yang memengaruhi kelancaran komunikasi organisasi.

Interpretasi

Dalam implementasi Aplikasi E-Buddy pada pelayanan administrasi Desa Kenongo, aparat desa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan pedoman serta ketentuan yang berlaku, yang tercermin dari kesesuaian antara praktik pelayanan administrasi berbasis aplikasi dengan regulasi dan panduan teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Menurut Charles O. Jones (1996), dimensi interpretasi dalam implementasi kebijakan menekankan pada proses pemahaman dan penerjemahan kebijakan oleh pelaksana agar tujuan dan arah kebijakan dapat dipahami secara seragam dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam konteks ini, aparat desa dituntut untuk memahami secara baik kebijakan digitalisasi pelayanan administrasi sehingga penggunaan Aplikasi E-Buddy dapat diterjemahkan secara tepat ke dalam aktivitas pelayanan sehari-hari. Pemahaman yang baik terhadap kebijakan tersebut memungkinkan aparat desa menjalankan prosedur pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendukung tercapainya sasaran kebijakan, yaitu peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat Desa Kenongo.

"Dulu waktu pertama launching memang ada pelatihan untuk pembuatan surat keluar, terus penerimaan disposisi, pembuatan SPPG untuk surat ujian. Tapi dulu waktu pelaunching, sekarang ya sudah tidak ada soalnya sudah fasih dari kami untuk pengoperasian aplikasinya. Lalu sekarang dari desa masing-masing perangkat sudah bisa login ke akun sendiri untuk melakukan presensi".

Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa menyatakan bahwa:

"mbak Irma sudah melakukan pelatihan untuk cara mengoperasikan aplikasi E-buddy ini dan dia juga sudah memegang aplikasi ini sejak diluncurkannya dari pusat. Jadi saya sebagai kepala desa sudah percaya kepada mbak Irma untuk menangani administrasi di desa kenongo dan mengurus surat masuk keluar serta surat tugas untuk saya dari pusat"

Dapat diketahui bahwa pada tahap awal penerapan Aplikasi E-Buddy di Desa Kenongo telah dilakukan kegiatan pelatihan bagi aparat desa, khususnya terkait pembuatan surat keluar, penerimaan disposisi, serta penyusunan SPPG untuk keperluan administrasi surat ujian. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparat desa dalam mengoperasikan aplikasi secara optimal. Seiring berjalannya waktu, aparat desa dinilai telah memiliki keterampilan yang memadai sehingga kegiatan pelatihan tidak lagi dilakukan secara rutin. Saat ini, setiap perangkat desa telah memiliki akun masing-masing untuk mengakses Aplikasi E-Buddy, termasuk dalam melakukan presensi secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi telah terintegrasi dalam aktivitas kerja aparat desa dan mendukung kelancaran pelayanan administrasi di Desa Kenongo.

Berdasarkan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa pada indikator interpretasi dalam implementasi Aplikasi E-Buddy di Desa Kenongo, aparat desa telah menunjukkan kemampuan dalam memahami dan menerjemahkan kebijakan digitalisasi pelayanan administrasi ke dalam praktik kerja sehari-hari. Hal ini terlihat dari pemanfaatan Aplikasi E-Buddy dalam pengelolaan administrasi surat-menyurat dan presensi aparat desa yang telah berjalan secara mandiri oleh masing-masing perangkat desa. Namun, pada tahap awal penerapan masih ditemukan kendala berupa keterbatasan pemahaman aparat desa terhadap fitur-fitur aplikasi, sehingga diperlukan adanya pelatihan untuk menunjang proses adaptasi penggunaan sistem.

Kondisi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan teori implementasi kebijakan pada indikator interpretasi menurut Charles O. Jones, yang menekankan bahwa pelaksana kebijakan harus mampu memahami dan menerjemahkan kebijakan secara seragam agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Jika disandingkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nadila dan Choiriyah (2023) berjudul *Implementation of E-Government Through E-Buddy in Sidoarjo Regency*, ditemukan kesamaan hasil penelitian, yaitu adanya kendala pada aspek sumber daya manusia dalam memahami dan mengoperasikan sistem E-Buddy secara optimal. Meskipun demikian, melalui proses pelatihan dan pengalaman penggunaan secara berkelanjutan, aparat desa di Desa Kenongo dinilai telah mampu menginterpretasikan kebijakan digitalisasi dengan baik, sehingga penggunaan Aplikasi E-Buddy saat ini dapat mendukung efektivitas dan kualitas pelayanan administrasi desa.

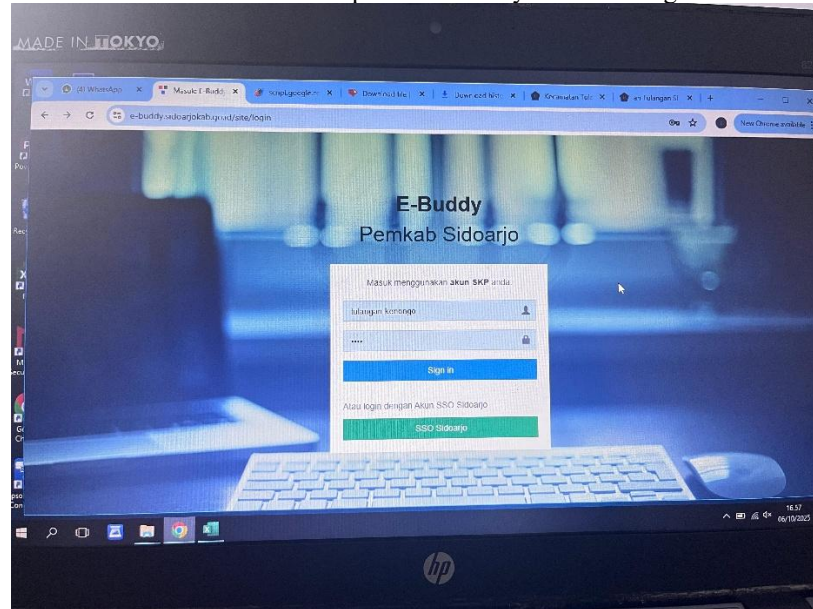
Hasil penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian Mulyoto dan Utami (2024) yang menjelaskan bahwa Aplikasi E-Buddy mampu mempermudah pengelolaan arsip surat masuk dan distribusi dokumen di instansi pemerintah. Akan tetapi, penelitian tersebut masih menemukan adanya gangguan sistem (error) dan keterbatasan tenaga operator yang kompeten dalam pengelolaan arsip digital. Berbeda dengan penelitian tersebut, hasil penelitian di Desa Kenongo menunjukkan bahwa dari aspek interpretasi, aparat desa telah memahami prosedur penggunaan aplikasi sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga pengelolaan surat masuk, surat keluar, disposisi, dan presensi dapat dilaksanakan secara mandiri. Dengan demikian, permasalahan dalam penelitian ini lebih banyak terjadi pada tahap awal implementasi dan berangsur berkurang setelah aparat memperoleh pengalaman dalam mengoperasikan aplikasi.

Aplikasi

Aplikasi atau penerapan merupakan tahapan di mana para pelaksana kebijakan menjalankan kegiatan pelayanan administrasi secara nyata di lapangan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Charles O.

Jones (1996), dimensi aplikasi dalam implementasi kebijakan menekankan pada tindakan konkret para pelaksana dalam menjalankan program, termasuk kepatuhan terhadap prosedur, penggunaan sumber daya, serta konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan.

Gambar 3
Gambar Beranda Aplikasi E-Buddy Desa Kenongo



Sumber : Dikelolah Desa Kenongo 2025

Dalam konteks penerapan Aplikasi E-Buddy di Desa Kenongo, tahap aplikasi mencakup serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparatur desa, baik secara individu maupun kelompok, untuk mencapai tujuan kebijakan, yaitu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan administrasi desa. Tindakan-tindakan tersebut direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis agar penggunaan aplikasi berjalan sesuai dengan prosedur dan mekanisme kerja yang telah ditentukan. Setiap langkah dalam penerapan Aplikasi E-Buddy diselaraskan dengan tujuan utama kebijakan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, sesuai dengan pandangan Charles O. Jones (1996), penerapan kebijakan yang efektif memerlukan koordinasi yang baik, konsistensi pelaksanaan, serta komitmen dari seluruh aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan dan penggunaan Aplikasi E-Buddy agar kebijakan dapat memberikan hasil yang optimal bagi pelayanan administrasi desa.

"karena sistem kan Mbak. Jadi kadang itu masuk, kadang nggak. Terus terkadang itu sekarang kayak ada undangan mendadak. Itu nggak dilewatkan e-buddy, tapi dilewatkan di grup. Di grup kayak Kepala Desa, di grup Sekdes. Jadinya itu tadi akhirnya kita miskomunikasi. Kayak Pak Lurah contohnya. Ada undangan kok ga kamu kabari? Sedangkan saya di e-buddy lho, nggak nerima. Itu pernah sempat saya proteskan di kecamatan waktu ada pembinaan. Setiap minggu itu kan ada pembinaan. Ternyata nggak hanya satu-dua desa saja yang mengalami seperti itu. Maksudnya gini, kalau memang di-share di Pak Kades sama Pak Sekdes itu kan kadang Pak Kades sudah tua, jarang mengambil hape. Terus pas saya nyekip gitu kan Mbak. Ya kadangan itu sudah dikirim tapi nggak tahu. Sering Mbak terjadi seperti itu. Akhirnya itu kesalahpahaman saya sama admin. Ya saya admin sama Pak Kepala Desa itu tadi. Dapat undangan kok? Nggak tahu. Padahal itu tadi kadang pun nggak dikirim di e-buddy. Karena kayak udah kemalaman gitu lho Mbak. Jadi lebih simpelnya itu, ya memang pembuatan suratnya tetap lewat e-buddy. Tapi nggak dikirim ke aplikasinya. Langsung diunduh, dikasih ke Pak Sekdes atau Pak Lurah itu tadi. Itu kendalanya. Untuk yang lain-lain sih nggak ada. Namanya sistem, kadang internet nggak masuk gara-gara perjarangan. Itu aja sih kendalanya di e-buddy selama saya megang jadi admin." ucap mbak irma selaku operasional aplikasi E-Buddy desa Kenongo.

Pernyataan kepala desa menyetujui statement dari mbak irma.

"Ya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan mbak irma. Memang terkadang ada informasi atau undangan yang seharusnya masuk ke Aplikasi E-Buddy tidak diterima oleh sistem, sehingga harus menyampaikan langsung melalui grup WhatsApp Kepala Desa atau Sekdes. Hal ini juga membuat komunikasi sedikit terhambat, terutama jika saya jarang membuka ponsel. Kendala seperti ini saya alami juga, sehingga kadang terjadi miskomunikasi antara mbak irma dan Saya."

Pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan Aplikasi E-Buddy di Desa Kenongo masih terdapat kendala teknis dan operasional yang berdampak pada kelancaran alur informasi. Gangguan sistem dan jaringan internet menyebabkan tidak semua undangan atau surat dapat tersampaikan melalui aplikasi, sehingga

sebagian informasi disalurkan melalui media lain seperti grup pesan singkat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan miskomunikasi antara admin aplikasi dan pimpinan desa, terutama ketika informasi tidak diterima secara bersamaan oleh pihak terkait. Meskipun demikian, proses pembuatan surat tetap dilakukan melalui Aplikasi E-Buddy, sehingga secara umum aplikasi masih digunakan sesuai fungsinya. Kendala yang terjadi bersifat situasional dan tidak menyeluruh, namun menunjukkan perlunya peningkatan keandalan sistem serta penguatan prosedur komunikasi agar penerapan Aplikasi E-Buddy dapat berjalan lebih optimal dan terintegrasi.

Berdasarkan fenomena di atas, penerapan Aplikasi E-Buddy di Desa Kenongo menunjukkan bahwa aparatur desa telah sesuai dalam melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi secara nyata sesuai kebijakan digitalisasi, seperti pembuatan surat, pengelolaan presensi, dan distribusi dokumen. Menurut Charles O. Jones (1996), dimensi aplikasi menekankan tindakan konkret pelaksana, kepatuhan terhadap prosedur, dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, berdasarkan wawancara dengan operator E-Buddy, masih ditemukan kendala teknis dan operasional, misalnya informasi atau undangan yang tidak masuk ke aplikasi sehingga harus disampaikan melalui grup WhatsApp, yang berpotensi menimbulkan miskomunikasi antara admin dan pimpinan desa, sebagaimana disetujui Kepala Desa. Meskipun demikian, fungsi utama aplikasi tetap berjalan, menunjukkan bahwa E-Buddy digunakan sesuai prosedur, tetapi memerlukan peningkatan keandalan sistem dan penguatan prosedur komunikasi agar penerapannya lebih optimal dan terintegrasi dalam mendukung efektivitas pelayanan administrasi desa.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Hanifah dan Rodiyah (2024) yang menjelaskan bahwa Aplikasi E-Buddy mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan administrasi pemerintahan apabila didukung oleh infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang memadai. Persamaan kedua penelitian terletak pada manfaat aplikasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi melalui sistem digital. Perbedaannya, penelitian Hanifah dan Rodiyah lebih menekankan pentingnya dukungan infrastruktur sebagai faktor keberhasilan implementasi, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun aparatur desa telah melaksanakan kebijakan sesuai prosedur dan memiliki kemampuan yang memadai dalam menggunakan aplikasi, efektivitas penerapan masih dipengaruhi oleh keandalan sistem dan jaringan internet. Oleh karena itu, dibandingkan penelitian terdahulu, penelitian ini memberikan temuan bahwa keberhasilan penerapan Aplikasi E-Buddy tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia dan kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga sangat bergantung pada stabilitas sistem informasi dan mekanisme komunikasi pendukung. Dengan demikian, peningkatan kualitas sistem aplikasi dan penguatan koordinasi komunikasi menjadi faktor penting agar implementasi Aplikasi E-Buddy dapat berjalan secara optimal, konsisten, dan berkelanjutan dalam mendukung pelayanan administrasi di Desa Kenongo.

VII. SIMPULAN

Fundamental Finding Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Aplikasi E-Buddy di Desa Kenongo telah berjalan cukup baik dalam mendukung peningkatan pelayanan administrasi desa berbasis digital, khususnya dalam aspek efisiensi pelayanan, kemudahan pengelolaan administrasi, transparansi kerja aparatur, serta adaptasi terhadap sistem digital, sejalan dengan indikator implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones (1996). Implication Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan Aplikasi E-Buddy berkontribusi positif dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa berbasis elektronik (e-government) dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi desa, sehingga berpotensi menjadi model inovasi pelayanan digital di tingkat desa. Limitation Keterbatasan penelitian ini terletak pada masih adanya kendala teknis sistem dan jaringan internet serta perbedaan pola komunikasi aparatur desa yang memengaruhi optimalisasi penggunaan Aplikasi E-Buddy. Future Research Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan informan, mengkaji tingkat kepuasan pengguna secara kuantitatif, serta meneliti strategi peningkatan keandalan sistem dan penguatan prosedur komunikasi guna mendukung keberlanjutan dan penyempurnaan implementasi Aplikasi E-Buddy.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "Implementasi Aplikasi E-Buddy dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi Desa Kenongo". Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga atas doa, kasih sayang, serta dukungan yang telah diberikan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas ilmu dan bimbingan selama masa perkuliahan, Pemerintah Desa Kenongo

yang telah memberikan izin dan membantu proses penelitian, serta teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- [1] R. D. Rahmawati and I. U. Choiriyah, "Optimizing official letter management with E-Buddy in village government," *Indonesian Journal of Public Policy Review*, vol. 25, no. 3, pp. 1–10, 2024.
- [2] S. H. Kustianingsih and I. U. Choiriyah, "Optimizing e-government through E-Buddy in Candipari village administration," *Indonesian Journal of Public Policy Review*, vol. 26, no. 3, pp. 1–12, 2025.
- [3] M. Z. Syauqi and A. Prastyawan, "Effectiveness of E-Buddy application-based attendance in supporting work discipline of state civil apparatus (case study: DPRD Secretariat of Sidoarjo)," *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan*, vol. 2, no. 1, pp. 28–40, 2023.
- [4] D. A. Firdaus and A. Wicaksono, "Peran aplikasi E-Buddy dalam mendukung sistem informasi manajemen pemerintah di Kecamatan Sidoarjo," *Jurnal PKLA*, vol. 5, no. 1, pp. 1–11, 2025.
- [5] S. T. Mulyoto and D. A. Utami, "Analisis aplikasi E-Buddy pada pengelolaan arsip surat masuk (studi pada DPMPSTSP Kabupaten Sidoarjo)," *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan*, vol. 1, no. 1, pp. 85–99, 2023.
- [6] A. Hanifah and I. Rodiyah, "E-Buddy's impact on local governance in Indonesia through transforming document management," *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, vol. 15, no. 3, pp. 1–9, 2024.
- [7] D. I. Nadila and I. U. Choiriyah, "Implementation of e-government through E-Buddy in Sidoarjo Regency," *Indonesian Journal of Public Policy Review*, vol. 25, no. 1, pp. 1–10, 2024.
- [8] F. F. Sakinah and I. U. Choiriyah, "The effectiveness of the E-Buddy application in improving employee performance in Larangan Village Government," *UMSIDA Preprints Server*, pp. 1–12, 2025.
- [9] "E-Buddy supports e-government administration in Desa Tambak Kalisogo and Pangreh," *JKMP: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, vol. 13, no. 1, pp. 1–14, Apr. 2025.
- [10] "Implementation of the E-Buddy Sidoarjo application in digital official letter management in Keboguyang Village, Jabon District," in *Proceedings of the International Conference on Social Science and Humanity*, vol. 2, no. 2, pp. 1–10, May 2025.
- [11] E. M. Damayanti and S. Hartono, "Effectiveness of E-Buddy use on incoming mail management at DPRD Sidoarjo Secretariat," in *Proceedings of the National Symposium on Public Administration*, pp. 1–8, 2025.
- [12] "E-Buddy helps optimizing administrative document process in rural digital governance," *JKMP: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, vol. 13, no. 1, pp. 1–12, 2025.
- [13] R. P. Sari and Y. Nugroho, "Pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi administrasi perkantoran," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 6, no. 2, pp. 123–132, 2018.
- [14] N. Rahmawati, "Pengelolaan arsip dan surat menyurat berbasis teknologi informasi," *Jurnal Ilmu Administrasi*, vol. 7, no. 1, pp. 45–54, 2019.
- [15] D. Mulyadi, "Peran teknologi informasi dalam mendukung kinerja tata usaha," *Jurnal Manajemen Perkantoran*, vol. 5, no. 1, pp. 67–76, 2020.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.